

ANALISIS PENDEKATAN EKUILIBRIUM PARSIAL DALAM ANALISIS TARIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU

Alvera Zahvania Putri, Deva Irfantara Pramudya,
Sherly Ulvia Saputri, Wiji Astutik
Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: alverazahvania@gmail.com, pramudya101103@gmail.com, sherlyulvia@gmail.com,
wijiastutik024@gmail.com

Abstract

International trade is an important component of global economic growth. One of the instruments used in regulating trade between countries is tariff policy, which aims to protect domestic industries, increase state revenues, and regulate the flow of imported goods. This article analyzes the impact of tariffs in the context of international trade using a partial equilibrium approach. This approach highlights the changes in prices and quantities in a particular market due to the imposition of tariffs, assuming other variables remain constant. The findings show that the imposition of tariffs can increase the prices of domestic goods, benefiting local producers, but harming consumers through higher prices and reduced welfare. In developing countries, tariffs provide industrial protection but can trigger inflation and reduce purchasing power. This article also reviews domestic responses, as well as the relevance of a partial equilibrium approach in understanding the impact of sectoral policies amidst the current global economic dynamics.

Keywords: *International Trade, Tariffs, Partial Equilibrium.*

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengatur perdagangan antarnegara adalah kebijakan tarif, yang bertujuan untuk melindungi industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, dan mengatur arus barang impor. Artikel ini menganalisis dampak tarif dalam konteks perdagangan internasional menggunakan pendekatan ekuilibrium parsial. Pendekatan ini menyoroti perubahan harga dan kuantitas pada satu pasar tertentu akibat penerapan tarif, dengan mengasumsikan variabel lain tetap konstan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan tarif dapat meningkatkan harga barang domestik, menguntungkan produsen lokal, tetapi merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan menurunnya kesejahteraan. Di negara berkembang, tarif memberikan proteksi industri namun dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Artikel ini juga meninjau respons domestik, serta relevansi pendekatan ekuilibrium parsial dalam memahami dampak kebijakan secara sektoral di tengah dinamika ekonomi global saat ini.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Tarif, Ekuilibrium Parsial.

Article history

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 661
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional, yang juga dikenal sebagai perdagangan luar negeri disebut sebagai bisnis global, merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara pelaku usaha dari dua negara atau lebih. Interaksi ekonomi lintas batas ini memungkinkan suatu negara untuk menjual produk ke negara lain (ekspor) maupun membeli produk dari luar negeri (impor), sesuai dengan keunggulan dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak hanya mencakup transaksi barang konsumsi, tetapi juga bahan baku, teknologi, dan jasa profesional. Melalui aktivitas ekspor dan impor, negara dapat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas, mendorong pertumbuhan sektor industri, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi dalam negeri.

Meskipun begitu, dalam implementasinya, perdagangan internasional kerap menghadapi berbagai bentuk hambatan yang membatasi kelancaran arus barang dan jasa antarnegara. Salah satu hambatan yang paling umum dijumpai adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah bentuk pajak atau bea yang dibebankan terhadap komoditas yang diperdagangkan melintasi batas wilayah suatu negara.¹ Pemerintah menerapkan kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan ini diwujudkan dengan menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap jenis barang tertentu. Akibatnya, harga barang impor menjadi lebih mahal dibandingkan produk lokal, sehingga produk dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif dan lebih diminati oleh konsumen. Di sisi lain, negara-negara yang menganut prinsip perdagangan bebas cenderung menetapkan tarif impor yang rendah atau bahkan menghapusnya, guna mendorong arus perdagangan global tanpa hambatan. Sebaliknya, negara yang menganut sistem proteksionisme akan memberlakukan tarif tinggi sebagai upaya membatasi impor dan memberikan perlindungan lebih besar bagi produsen domestik.²

Dalam konteks perdagangan internasional, penerapan tarif tidak hanya berdampak pada negara yang menerapkannya, tetapi juga dapat memicu reaksi dari negara-negara mitra dagang. Ketika suatu negara menetapkan tarif impor terhadap produk asing, hal ini sering kali mendorong negara lain untuk merespons dengan kebijakan serupa. Respons timbal balik ini dapat memicu eskalasi ketegangan perdagangan yang dikenal sebagai perang dagang (trade war). Akibatnya, hubungan ekonomi antarnegara menjadi tegang dan volume perdagangan global berpotensi menurun secara signifikan.

Bagwell dan Staiger menyoroti bahwa perang tarif semacam ini bukan hanya berdampak pada perdagangan barang, tetapi juga dapat menghambat aliran modal dan transfer teknologi antarnegara. Di samping itu, gangguan pada arus barang lintas negara turut mempengaruhi kelancaran rantai pasok global, yang sangat bergantung pada efisiensi dan keterbukaan pasar internasional.

Contoh nyata dari dinamika ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konflik ini, kedua negara secara bergantian mengenakan tarif tambahan terhadap berbagai produk satu sama lain. Akibatnya, sejumlah sektor ekonomi strategis di kedua negara mengalami tekanan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Dampak jangka panjang dari perang dagang tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha domestik, tetapi juga oleh negara-negara lain yang terintegrasi dalam rantai pasokan global yang melibatkan AS dan Tiongkok. Pada akhirnya,

¹ Nazaruddin Malik, *Ekonomi Internasional* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), https://Books.Google.Com/Books/About/Ekonomi_Internasional.Html?HI=Id&Id=Gytjdwaaqbaj#V=Onepage&Q&F=False.

² Alam S, *Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Jilid_2/Ebyjxelga7ec?HI=Id.

kondisi ini turut menurunkan tingkat perdagangan internasional secara keseluruhan dan meningkatkan ketidakpastian dalam ekonomi global.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan konsekuensi dari penerapan tarif dalam konteks perdagangan internasional. Pemahaman ini mencakup kajian terhadap alasan di balik pengenaan tarif, pengaruhnya terhadap perekonomian nasional maupun global, serta dampaknya terhadap perkembangan hubungan dagang antarnegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis pendekatan ekuilibrium parsial dalam analisis tarif dan dampaknya terhadap negara berkembang dan negara maju dengan metode pendekatan kualitatif dan kajian literatur. Pengumpulan data dengan studi pustaka, yang mencakup buku, artikel ilmiah dan laporan penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisis berbagai referensi khususnya data dari berbagai jenis artikel ilmiah. Pengumpulan data melibatkan identifikasi dan pemilihan informasi dari literatur yang sesuai. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan kunci serta implikasi analisis pendekatan ekuilibrium parsial dalam analisis tarif dan dampaknya terhadap negara berkembang dan negara maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EKUILIBRIUM PARSIAL DALAM ANALISIS TARIF

Sebuah pasar dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Keseimbangan ini tercapai ketika harga yang berlaku adalah harga keseimbangan yaitu harga di mana produsen bersedia menjual dan konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang sama. Apabila harga berada di atas harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*), sedangkan jika harga berada di bawah harga keseimbangan, akan muncul kelebihan permintaan (*excess demand*). Kedua situasi tersebut mencerminkan kondisi pasar yang tidak seimbang. Dalam sistem pasar yang bersifat kompetitif, diasumsikan bahwa kelebihan penawaran akan mendorong harga turun, sementara kelebihan permintaan akan mendorong harga naik. Oleh karena itu, dalam pasar yang kompetitif, harga akan cenderung menyesuaikan diri hingga mencapai keseimbangan.

Analisis ekuilibrium parsial berfokus pada penggambaran kondisi keseimbangan dalam satu pasar pada satu waktu tertentu. Menurut Nicholson, perubahan harga di satu pasar dapat menimbulkan dampak pada pasar lainnya, dan efek tersebut selanjutnya dapat menjalar ke seluruh sistem ekonomi. Bahkan, pengaruh tersebut bisa cukup besar hingga berdampak kembali pada keseimbangan harga dan kuantitas di pasar asal. Untuk menangkap dinamika ekonomi yang lebih kompleks, diperlukan pendekatan yang melampaui analisis keseimbangan parsial, yakni dengan membangun model yang mampu mengevaluasi berbagai pasar secara bersamaan. Dalam hal ini, model keseimbangan umum berperan sebagai kerangka analisis yang memetakan hubungan antarpasar serta interaksi antara industri, faktor produksi, dan institusi secara menyeluruh.³

Analisis ekuilibrium parsial dalam konteks kebijakan tarif merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan tarif impor atau ekspor terhadap satu jenis pasar atau komoditas secara spesifik. Pendekatan ini membatasi ruang lingkup kajian hanya pada pasar yang sedang dianalisis, tanpa memperhitungkan keterkaitan atau pengaruh dari pasar lain yang mungkin memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung.

³ Elpisah, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Purwokerto: Cv. Pena Persada, 2022), hal. 183—184

Fokus utama dari metode ini adalah pada penyesuaian harga dan kuantitas keseimbangan di pasar yang dikenai tarif, serta bagaimana perubahan tarif tersebut memengaruhi perilaku konsumen dan produsen dalam pasar tersebut. Dengan mengasumsikan bahwa kondisi di pasar lainnya serta faktor-faktor produksi tetap konstan (*ceteris paribus*), analisis ini memberikan gambaran yang jelas dan sederhana mengenai efek langsung suatu kebijakan tarif terhadap satu sektor tertentu.

Pendekatan ini sangat berguna dalam merancang kebijakan mikroekonomi, karena mampu menggambarkan dengan lebih konkret dampak awal dari kebijakan tarif terhadap volume perdagangan, harga barang, kesejahteraan pelaku ekonomi, serta potensi terjadinya distorsi pasar. Namun, perlu dicatat bahwa karena tidak mempertimbangkan interaksi antar sektor atau perubahan dalam alokasi sumber daya secara keseluruhan, hasil dari analisis ekuilibrium parsial bersifat terbatas dan tidak mencerminkan dinamika sistem ekonomi secara menyeluruh.⁴

TARIF DAN MEKANISMENYA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tarif adalah bea atau pajak yang dikenakan terhadap barang perdagangan yang melewati wilayah hukum (*custom area*) suatu negara. Tarif ini terdiri dari tarif impor (*import barriers*) dan tarif ekspor (*export barriers*). Tarif impor adalah bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke wilayah (*custom area*) suatu negara dari negara lain, dan tarif ekspor adalah bea yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari wilayah (*custom area*).

Dalam kenyataan bahwa tarif impor lebih penting dari tarif ekspor. Negara-negara dunia ketiga cenderung masih menerapkan kebijakan tarif impor atas berbagai komoditas dari luar negeri demi untuk melindungi industri di dalam negeri (proteksi) dari industri yang sudah maju di luar negeri. Pembahasan dalam bab ini adalah pembahasan terhadap kebijakan tarif impor. Dengan pengenaan bea impor maka akan mengurangi kuantitas komoditas impor sehingga mendorong produksi dalam negeri untuk menambah tenaga kerja untuk memproduksi. Hal ini memicu kesempatan kerja meningkat. Tarif digolongkan atas tiga golongan yaitu:

1. Tarif ekspor adalah tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas yang dikirim keluar negeri.
2. Tarif transito adalah tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas yang melalui suatu negara tetapi tujuan komoditasnya adalah negara lain.
3. Tarif impor adalah tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas yang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara yang mengenakan tarif adalah negara yang mengirim komoditas tersebut.⁵

Dampak langsung dari penerapan tarif terhadap inflasi dan biaya produksi yaitu:

1. Kenaikan Harga Barang: Pengenaan tarif langsung mempengaruhi harga barang investasi dan konsumsi. Misalnya, kenaikan tarif 25% dapat menyebabkan kenaikan harga barang investasi sekitar 9,5% dan kenaikan harga barang konsumsi sekitar 2,2%.
2. Inflasi Jangka Pendek: Tarif dapat meningkatkan inflasi jangka pendek dengan menaikkan biaya barang impor, yang akan dibayar oleh perusahaan dan pelanggan.

Dampak tidak langsung dari penerapan tarif terhadap inflasi dan biaya produksi yaitu:

1. Penyesuaian Pasokan: Produsen dalam negeri mungkin menanggapi tarif dengan menaikkan harga atau mengganti pemasok, yang dapat memperbesar dampak tarif.

⁴ Deki Paryadi, "Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan Negara Gulf Cooperation Council (Gcc)" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 3 (2018), 225

⁵ Bonajara Purba, *Ekonomi Internasional*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hlm. 38—39

2. Perubahan Perilaku Konsumen: Konsumen mungkin mengubah cara mereka membeli barang sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga.
3. Implikasi untuk Investasi: Keputusan bisnis dapat dipengaruhi oleh peningkatan biaya investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.⁶

PENERAPAN PENDEKATAN EKUILIBRIUM PARSIAL DALAM ANALISIS TARIF

Salah satu alat penting dalam kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan tarif, yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan mengontrol arus barang impor. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif adalah ekuilibrium parsial. Metode ini memfokuskan analisis pada satu pasar atau sektor tertentu dengan asumsi bahwa pasar lain tidak terpengaruh secara langsung oleh kebijakan tersebut. Ini menjadikan ekuilibrium parsial sebagai alat yang efektif untuk memahami dampak kebijakan tarif pada keseimbangan harga, volume perdagangan, dan kesejahteraan konsumen dan produsen dalam suatu industri.

Analisis ekuilibrium parsial mengukur dampak perubahan kebijakan, seperti tarif impor, terhadap penawaran dan permintaan dalam satu pasar. Dalam kebanyakan kasus, model ini menganggap harga barang internasional tetap, terutama di negara-negara kecil yang tidak mempengaruhi harga global. Model ini memungkinkan untuk menganalisis dampak penurunan tarif terhadap surplus konsumen dan produsen, serta pendapatan pemerintah dari tarif impor dalam konteks ini, karena tarif akan meningkatkan harga domestik, mengurangi volume impor, dan berdampak pada kesejahteraan konsumen dan produsen.⁷

Tarif impor membuat harga barang di pasar domestik meningkat karena harga barang impor naik, menguntungkan produsen lokal yang dapat menetapkan harga lebih tinggi. Namun, harga barang menjadi lebih mahal bagi konsumen, sehingga konsumsi cenderung menurun. Dalam kasus ini, jika harga gula naik, konsumen akan mengurangi pembelian gula, yang berdampak negatif pada kesehatan mereka. Tarif meningkatkan surplus produsen dan pendapatan pemerintah dari pajak impor, tetapi efek buruk terhadap kesejahteraan konsumen sering kali lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh produsen dan pemerintah.⁸

DAMPAK TARIF TERHADAP NEGARA BERKEMBANG

Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh negara atas barang (barang impor) dari luar negeri. Penerapan tarif memiliki beberapa tujuan utama yang terkait dengan manajemen domestik dan manajemen hubungan perdagangan internasional. Salah satu tujuan utama mengenai penggunaan tarif adalah untuk melindungi industri domestik, yaitu untuk melindungi produsen lokal sebelum persaingan untuk harga impor. Produk domestik masih dimaksudkan untuk berkembang dalam kompetisi. Selain itu, tarif juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, karena tarif yang terdaftar pada barang impor menjadi bentuk peralatan impor yang berkontribusi pada pendapatan negara. Tidak hanya itu, tarif juga dapat digunakan sebagai alat negosiasi perdagangan, yaitu, sebagai strategi diplomatik dalam mencapai perjanjian menguntungkan antara mitra dagang.

Pada kenyataannya, tarif dibagi menjadi metode yang berbeda, masing-masing dengan mekanisme perhitungan dan aplikasinya sendiri. Pertama, tarif bea cukai -valorem dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang impor. Kedua, ada tingkat bunga tertentu, dihitung sebagai jumlah tetap per unit barang, terlepas dari nilai barang. Selain itu, ada tarif

⁶ Bart Hobijn dan Fernanda Necho, "The Effects of Tariffs on Inflation and Production Costs", dalam <https://www.frbsf.org>, diakses 23 Mei 2025

⁷ Inayah, I, "Dampak Penurunan Tarif Impor Komoditas Pertanian terhadap Kesejahteraan (Analisis Keseimbangan Parsial)", dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31567>, diakses 23 Mei 2025

⁸ Eva Ulina Sihombing, Dkk, "Kebijakan Tarif dalam Ekonomi Internasional: Analisis Dampak dan Implementasi", dalam <https://ulilalbabbinstitute>, diakses 23 mei 2025

campuran, yang merupakan kombinasi dari tarif AD-valorem dan biaya spesifik, menggabungkan manfaat dari dua pendekatan. Akhirnya, ada alokasi informasi, jenis tarif yang digunakan bersamaan dengan batas jumlah impor yang berlaku untuk peluang tertentu dan yang berbeda ketika pengkondisian terlampaui. Dampak tarif di negara -negara berkembang⁹:

1. Dampak pada produsen

Penggunaan tarif dalam perdagangan internasional dapat memberikan perlindungan yang cukup besar bagi produsen lokal, khususnya di negara -negara berkembang. Salah satu keuntungan utama adalah meningkatkan daya saing produk domestik. Dengan diperkenalkannya tarif, barang impor menjadi sangat mahal, sehingga konsumen domestik cenderung memilih produk lokal yang lebih murah. Ini secara tidak langsung meningkatkan status produk domestik di pasar domestik, mendorong pertumbuhan di sektor industri nasional. Selain itu, meningkatnya permintaan untuk produk lokal mendorong produsen domestik untuk meningkatkan kapasitas produksi karena tingginya biaya produk impor. Peningkatan produksi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional.

Namun, meskipun ada manfaatnya, penerapan tarif juga menyimpan sejumlah dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah ketergantungan produsen pada proteksi tarif, yang dalam jangka panjang dapat membuat mereka menjadi kurang efisien dan tidak terdorong untuk berinovasi. Tanpa tekanan persaingan dari barang impor, produsen mungkin tidak termotivasi untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya produksi.

2. Dampak pada Konsumen

Penerapan tarif di negara berkembang tidak hanya berdampak pada produsen dan pemerintah, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh konsumen. Salah satu dampak paling nyata adalah kenaikan harga barang. Tarif yang dikenakan pada barang impor menyebabkan harga produk luar negeri menjadi lebih mahal. Kondisi ini juga sering dimanfaatkan oleh produsen lokal untuk menaikkan harga produknya karena persaingan dengan barang impor berkurang. Akibat dari kenaikan harga tersebut, daya beli konsumen pun menurun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih sensitif terhadap perubahan harga. Penurunan daya beli ini dapat menurunkan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, terbatasnya pilihan produk di pasar juga menjadi salah satu konsekuensi dari pembatasan impor.

3. Dampak pada Pemerintah

Pemerintah di negara berkembang juga merasakan dampak langsung dari penerapan tarif, baik dalam bentuk manfaat ekonomi maupun risiko kebijakan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan pendapatan negara, karena tarif menghasilkan pemasukan tambahan melalui bea masuk atas barang-barang impor. Pendapatan ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan, subsidi, dan kebutuhan belanja negara lainnya. Selain itu, tarif juga dapat berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi, khususnya dengan melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar yang tidak seimbang. Perlindungan ini membantu menjaga lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena sektor produksi lokal tetap hidup dan berkembang. Namun, pada sisi lain, masih ada risiko berfokus yg mengiringi kebijakan tarif, terutama pada konteks interaksi internasional. Salah satu risiko tadi

⁹ Eva Ulina Sihombing, Khairani Alawiya Matondang, Juanda Maulana, Lora Theresia Panggabean, dan Siti Naila Rahmi. 2024. *Kebijakan Tarif dalam Ekonomi Internasional: Analisis Dampak dan Implementasi*, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4(1), 1708–1720, diakses 25 Mei 2025, <https://ulilalbabinstiute.id/index.php/EKOMA/article/download/6069/4785/12180>.

merupakan retaliasi dagang, yaitu respons berdasarkan negara kawan dagang yg merasa dirugikan sang kebijakan tarif suatu negara.

Respons pasar domestik pada negara berkembang terhadap kebijakan tarif menampilkan banyak sekali dinamika ekonomi yg khas. Salah satu respons primer merupakan peningkatan produksi lokal. Ketika tarif diberlakukan terhadap barang impor, harga barang tadi sebagai lebih mahal pada pasar domestik. Kondisi ini menaruh peluang bagi pembuat lokal buat mengisi kekosongan pasar & mempertinggi produksi guna memenuhi permintaan yg sebelumnya dipenuhi sang barang-barang impor. Hal ini jua bisa mendorong berkembangnya sektor industri pada negeri & membentuk lapangan kerja baru.

Namun, penerapan tarif jua bisa mengakibatkan tekanan inflasi. Barang-barang impor yg dikenakan tarif, terutama bila adalah kebutuhan utama atau bahan standar industri, akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini berdampak dalam porto produksi & harga jual barang pada pasaran, sebagai akibatnya memicu inflasi yg bisa menurunkan daya beli warga secara umum. Dalam jangka panjang, inflasi yg nir terkendali sanggup mengganggu kestabilan ekonomi nasional. Selain itu, terjadi jua perubahan pola konsumsi pada kalangan warga. Ketika harga barang impor meningkat, konsumen cenderung membarui preferensinya menggunakan beralih ke produk lokal atau mencari cara lain yg lebih murah & terjangkau.

DAMPAK TARIF TERHADAP NEGARA MAJU

1. Perlindungan Industri pada Negeri

Perkembangan interaksi perdagangan internasional menyaratkan seluruh negara buat melakukan kerjasama perdagangan menggunakan negara lainnya. Hal ini disadari lantaran nir terdapat satupun negara global ini yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sepenuhnya. Dengan keterbatasan asal daya yang dimiliki negara-negara jua nir mungkin mereka sanggup memenuhi kebutuhannya. Sebuah negara sanggup saja menghasilkan eksklusif pada negaranya, namun pada ketika yang sama beliau niscaya membutuhkan produk negara lain buat memenuhi kebutuhannya.

Robber Howse membedakan dua macam kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi tidak *fair* dalam perdagangan internasional yaitu, kebijakan yang bersifat *offensive unfairness* dan *defensive unfairness*. Kebijakan yang bersifat *offensive unfairness* yaitu kebijakan negara dalam posisinya sebagai negara eksporter yang menyebabkan terjadinya kondisi persaingan yang tidak sehat pada pasar negara importir atau pasar negara ketiga. Dalam hal kebijakan yang bersifat *defensive unfairness* adalah kebijakan negara untuk memberikan perlakuan istimewa kepada produk dalam negerinya dan menghukum produk luar negeri yang masuk ke dalam pasar dalam negerinya¹⁰.

a. *Countervailing Duty*

Rezim hukum *countervailing duties* adalah kewajiban khusus yang dikenakan untuk menghadapi setiap subsidi atau yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan, produksi atau ekspor perdagangan. Kebijakan negara untuk menerapkan *Countervailing Duties* sebagai akibat dari kebijakan subsidi negara lain harus menunjukkan bahwa kebijakan subsidi tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian material (*material injury*) bagi industri dalam negeri (*domestic industri*) negara importir, baik industri yang telah ada (*an established industri*) maupun menghalangi industri yang akan terbentuk (*to retard materially the establishment industri*).

b. *Safeguards*

¹⁰ Michael J Trebilock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, Second Edition, (New York: Routledge, 1999), hlm.168

Safeguard adalah kebijakan dari negara pengimpor untuk membatasi masuknya barang impor yang bisa membahayakan ekonomi dan industri dalam negerinya. Bentuknya bisa berupa kenaikan tarif, pembatasan jumlah impor, atau kesepakatan sukarela dari negara pengekspor. Kebijakan ini muncul karena adanya perdagangan bebas yang membuat arus barang dan jasa antarnegara menjadi lebih mudah. Namun, impor yang meningkat bisa merugikan industri lokal. Maka dari itu, negara pengimpor diberi hak untuk sementara membatasi impor agar industri dalam negeri bisa bertahan.

c. *Antidumping*

Tindakan Dumping dalam perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan semangat persaingan dagang yang adil sebagaimana yang dikehendaki GATT/WTO. Perdagangan bebas (*free trade*) menghendaki adanya persaingan yang adil antara negara dalam melakukan aktivitas perdagangan. Artinya, bahwa perdagangan bebas tidak menghendaki adanya kebijakan pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha lain dalam melakukan aktivitas perdagangan, tetapi harus mendapat keuntungan dari aktivitas perdagangan yang bebas itu. Kebijakan antidumping merupakan reaksi dari negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan penjualan perusahaan negara lain yang melakukan praktek dumping.

2. Efisiensi Pasar dan Kesejahteraan Konsumen

Efisiensi pasar (efisiensi pasar) umumnya didefinisikan sebagai hubungan antara harga sekuritas dan informasi. Secara rinci, Anda dapat mendefinisikan efisiensi pasar untuk berbagai jenis definisi, yaitu¹¹:

a. Definisi efisiensi pasar berdasarkan *Essential Securities*

Efisiensi pasar diukur dengan mana harga sekuritas berbeda dari nilai internalnya. Ini berarti bahwa pasar yang efisien dapat didefinisikan sebagai pasar sesuai dengan konsep ini. Konsep ini tidak berbeda dari nilai internalnya dalam nilai sekuritasnya.

b. Berdasarkan keakuratan harga

Pasar dianggap efisien jika harga sekuritas mencerminkan informasi lengkap. Berikut adalah dua aspek yang ditekankan: aspek "sepenuhnya tercermin" pertama. Ini menunjukkan bahwa harga sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Kedua, "informasi yang tersedia" berarti bahwa investor dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk secara akurat mengharapkan harga sekuritas yang bertanggung jawab.

c. Berdasarkan distribusi informasi

Definisi ini secara implisit menyatakan bahwa setiap orang mengamati sistem informasi yang tersedia di pasar dan bahwa setiap orang dianggap sebagai informasi yang sama. Pasar harus efisien dalam sistem informasi, seolah-olah harga sekuritas adalah semua orang yang mengamati sistem informasi.

d. Berdasarkan proses dinamis

Definisi efisiensi pasar berdasarkan proses dinamis dengan mempertimbangkan distribusi informasi tidak teratur menjelaskan bagaimana harga beradaptasi untuk informasi non-karakteristik. Definisi berbasis proses dinamis ini menekankan laju penyebaran informasi non-simetris. Pasar harus efisien sehingga informasi ini menyebar dengan cepat dan informasinya simetris, yang berarti bahwa setiap orang memiliki informasi ini. Informasi yang bukan informasi asimetris atau

¹¹ Ayudha D. Prayoga, Dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, (Jakarta: Partnership for Business Competition, 2001), hlm.117

asimetris (informasi asimetris) adalah informasi pribadi yang hanya mencakup investor (investor informasi).

Kesejahteraan Konsumen

Kesejahteraan konsumen adalah kepuasan yang disimpan konsumen melalui konsumsi barang dan jasa mereka. Konsep ini penting dalam perekonomian karena menunjukkan apakah sistem pasar dan kebijakan pemerintah telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan metode mikro-ekonomi, sumur konsumen biasanya diukur dengan surplus konsumen. Ini adalah perbedaan antara nilai maksimum yang siap dibayar konsumen dan harga pasar yang dibayarkan¹².

Menurut Sukirno, sumur konsumen dapat dianalisis dengan teori perilaku konsumen, yaitu, cara konsumen mengalokasikan pendapatan untuk mencapai kepuasan maksimum.¹³ Komponen Kesejahteraan Konsumen:

a. Utilitas Total dan Utilitas Marginal

Utilitas total adalah kepuasan keseluruhan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah barang tertentu, sedangkan utilitas marginal adalah tambahan kepuasan dari tambahan satu unit barang yang dikonsumsi.

b. Kurva Indiferens dan Garis Anggaran

Merupakan alat untuk mempelajari kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen dengan keterbatasan anggaran.

c. Surplus Konsumen

Surplus konsumen menunjukkan besarnya manfaat ekonomi yang diterima konsumen karena dapat membeli barang dengan harga lebih rendah daripada nilai maksimum yang mereka bersedia bayar.

Faktor -faktor yang mempengaruhi sumur konsumen:

a. Harga barang dan jasa

b. Pendapatan konsumen

c. Suka atau rasa

d. Kualitas dan Keamanan Produk

e. Akses ke Informasi Produk

f. Kebijakan dan Perlindungan Pemerintah dan Perlindungan Pemerintah dan Perlindungan

IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Kerja Sama Multilateral

Kerjasama multilateral mencakup kolaborasi antara tiga atau lebih pihak, umumnya negara-negara, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan mengatasi isu-isu global yang kompleks.⁵ Dalam konteks internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah contoh institusi multilateral yang memfasilitasi kerjasama antara banyak negara. Salah satu dampak utama kerjasama multilateral adalah terciptanya aturan dan norma internasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan global, termasuk perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian.

WTO, sebagai contoh, mengembangkan peraturan perdagangan internasional yang berlaku untuk seluruh anggota, menciptakan kerangka kerja yang adil dan dapat diprediksi bagi semua peserta pasar. Kerjasama multilateral juga menciptakan platform bagi negara-negara untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya. PBB, melalui berbagai agensinya, memfasilitasi dialog dan kerjasama antara

¹² Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan usaha partisipatif Vs Konsentrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kopkar Dekopin, 1990), hlm.17

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm.412.

negara-negara dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ini melibatkan pertukaran pengalaman, pelatihan, dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ekonomi, kerjasama multilateral juga melibatkan upaya bersama dalam mengatasi tantangan global, seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan iklim, dan pandemi. Negara-negara bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang saling mendukung dan bersinergi, menciptakan tanggapan yang terkoordinasi terhadap isu-isu kompleks yang tidak dapat diatasi secara efektif oleh satu negara saja. Pentingnya kerjasama multilateral juga tercermin dalam upaya bersama untuk menyelesaikan konflik dan mendorong perdamaian di tingkat internasional.

PBB memiliki peran kunci dalam mediasi konflik dan pemeliharaan perdamaian, membantu negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan diplomatis dan kolaboratif. Namun, meskipun kerjasama multilateral memiliki potensi besar, tantangan juga muncul. Perbedaan kepentingan dan pandangan antara negara-negara dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang efektif. Selain itu, lemahnya implementasi dan penegakan aturan internasional oleh beberapa negara dapat mengurangi efektivitas kerjasama multilateral.¹⁴

2. Reformasi Kebijakan Perdagangan

Reformasi kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang ditujukan untuk memperbarui, meningkatkan, dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang sudah ada, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada, serta merancang perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan dampak positif kebijakan tersebut. Reformasi kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk konteks di mana kebijakan diimplementasikan. Seiring dengan perubahan dinamis dalam masyarakat dan lingkungan global, reformasi kebijakan menjadi penting untuk menjaga relevansi, keadilan, dan keberlanjutan kebijakan publik.¹⁵

Reformasi kebijakan perdagangan adalah upaya pembaruan dan penyederhanaan aturan, prosedur, serta sistem yang mengatur aktivitas perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Reformasi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, tumpang tindihnya regulasi, serta lambatnya proses perizinan yang menghambat arus barang dan jasa.

Dengan adanya reformasi, diharapkan iklim perdagangan menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi kebijakan perdagangan menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut kelancaran dan kepastian bagi para pelaku usaha, khususnya dalam aktivitas ekspor dan impor. Sebelum reformasi dilakukan, banyak masalah muncul dari sisi perizinan, seperti proses yang tidak transparan, waktu penerbitan yang lama, serta aturan yang terlalu banyak dan membingungkan. Misalnya, ada puluhan peraturan yang mengatur berbagai jenis komoditas, sehingga pelaku usaha sering kesulitan dalam memahaminya. Belum lagi, sistem birokrasi yang berbelit karena belum terintegrasi antara satu instansi dengan instansi lainnya.

¹⁴ Putri Puja dkk, "Kerjasama Regional Dan Multilateral Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Political Studies*, Vol. 4, No. 1, April 2024, Hal. 62-63.

¹⁵ Imam Hanafi, *Reformasi Kebijakan*, Kota Solok Sumatra Barat, PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, Hal. 1.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di bidang perdagangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi, dan kemudahan dalam berusaha. Dari situ, lahirlah dua peraturan menteri yang penting: Permendag No. 19/2021 jo. No. 12/2022 untuk ekspor, dan Permendag No. 20/2021 jo. No. 25/2022 untuk impor. Kedua peraturan ini menyatukan semua aturan lama dan membuat prosesnya jadi lebih praktis.

Ada beberapa perubahan besar yang menunjukkan semangat reformasi ini. Pertama, semua proses perizinan sekarang wajib dilakukan secara online melalui sistem nasional, tidak lagi manual. Kedua, pemerintah menerapkan sistem pelayanan terpadu yang menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ketiga, diterapkan prinsip "fiktif positif", yaitu jika dalam 5 hari kerja perizinan tidak juga diproses, maka izin akan otomatis terbit. Ini sangat membantu pelaku usaha karena mempercepat proses dan mengurangi ketidakpastian. Intinya, reformasi kebijakan perdagangan ini bukan sekadar soal aturan baru, tapi soal menciptakan sistem yang lebih ramah, cepat, dan jelas bagi semua pelaku usaha. Dengan begitu, iklim investasi bisa lebih menarik, perdagangan luar negeri bisa meningkat, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih baik.¹⁶

3. Relevansi pendekatan ekuilibrium parsial dalam konteks global saat ini

Di tengah dunia yang semakin kompleks ini, kita butuh cara yang sederhana tapi tetap tajam untuk memahami apa yang terjadi di sektor ekonomi tertentu. Salah satu cara yang sering digunakan oleh ekonom adalah pendekatan ekuilibrium parsial. Secara sederhana, pendekatan ini hanya melihat satu pasar atau sektor secara mendalam, dengan asumsi bahwa sektor lain tidak mengalami perubahan. Misalnya, kalau kita mau tahu dampak kenaikan pajak rokok terhadap harga dan konsumsi rokok, kita tidak perlu menganalisis seluruh ekonomi, cukup fokus pada pasar rokok saja. Metode ini membantu kita melihat secara cepat dan jelas apa akibat langsung dari suatu kebijakan di satu area tertentu tanpa terganggu oleh faktor-faktor lain yang terlalu luas.¹⁷

Nah, pendekatan ini ternyata masih sangat relevan di era global saat ini. Kenapa? Karena banyak kebijakan pemerintah dan perubahan global yang berdampak hanya pada sektor-sektor tertentu. Misalnya, ketika ada konflik internasional seperti perang Rusia-Ukraina, harga energi dan pangan melonjak. Pemerintah harus cepat merespons, dan biasanya mereka hanya butuh informasi spesifik: bagaimana dampaknya ke petani padi, ke nelayan, atau ke harga BBM. Dengan pendekatan ekuilibrium parsial, dampak-dampak ini bisa dianalisis secara cepat dan cukup akurat. Ini sangat penting ketika waktu terbatas dan data belum lengkap seperti saat krisis.

Pendekatan ini juga sering digunakan untuk menilai dampak perjanjian dagang. Salah satu contoh nyatanya adalah perjanjian Indonesia-China (IC-FTA). Penelitian yang menggunakan pendekatan ini menemukan bahwa meskipun perjanjian itu membuat barang-barang impor dari China jadi lebih murah bagi konsumen Indonesia, tetapi produsen lokal justru dirugikan karena kalah bersaing. Dalam hal ini, ekuilibrium parsial membantu mengungkap sisi gelap dari perjanjian yang terlihat menguntungkan di permukaan. Pemerintah pun bisa mempertimbangkan ulang kebijakan seperti ini jika dampaknya terlalu berat untuk sektor tertentu.¹⁸

¹⁶ Dioni Y. R. & M. Rofi, Dampak Reformasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Kinerja Perdagangan Luar Negeri, *Journal of Trade Development and Studies*, Volume 8 Nomor 2, 2024, Hal. 174-177.

¹⁷ Yoyok Cahyono dkk, *Ekonomi Internasional*, Kota Selayo Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri, 2021.

¹⁸ Sulthon Sjahril Sabaruddin, *Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral RI-China: Sebuah Pendekatan SMART Model*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2015.

Bukan cuma perdagangan, pendekatan ini juga sangat berguna untuk masalah pangan dan energi dua sektor vital yang sangat sensitif terhadap perubahan global. Misalnya, ketika pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan tarif impor kedelai agar petani lokal lebih terlindungi, pendekatan ekuilibrium parsial bisa langsung menunjukkan apa yang akan terjadi: apakah harga tahu-tempe akan naik? Apakah petani lokal benar-benar akan diuntungkan? Apakah konsumsi masyarakat akan menurun? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijawab lewat simulasi model parsial, yang sederhana namun tetap kuat.¹⁹

Tentu, seperti metode lainnya, pendekatan ini tidak sempurna. Karena hanya fokus pada satu sektor, pendekatan ini tidak bisa menangkap dampak tidak langsung ke sektor lain. Misalnya, jika kita menaikkan tarif kedelai, mungkin saja itu berdampak pada industri makanan, gizi masyarakat, bahkan inflasi secara keseluruhan. Hal-hal ini tidak terlihat jika kita hanya menggunakan ekuilibrium parsial. Oleh karena itu, para ekonom biasanya juga melibatkan model ekuilibrium umum jika ingin melihat gambaran besar yang lebih komprehensif. Tapi untuk keperluan analisis awal atau keputusan cepat, pendekatan parsial tetap sangat bermanfaat.

Meskipun terkesan sederhana, pendekatan ekuilibrium parsial tetap menjadi alat penting dalam kebijakan ekonomi, apalagi di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Karena fleksibel, cepat, dan mudah digunakan, pendekatan ini membantu pengambil kebijakan melihat dengan jernih apa yang mungkin terjadi jika mereka membuat keputusan tertentu. Di masa-masa sulit, alat yang sederhana seperti ini bisa menjadi penyelamat karena memberi informasi yang cukup untuk bertindak dengan cepat dan tepat.²⁰

KESIMPULAN

Artikel ini menyoroti pentingnya kebijakan tarif dalam perdagangan internasional, khususnya melalui pendekatan ekuilibrium parsial. Kebijakan tarif, yang diterapkan untuk melindungi industri domestik, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian baik di negara berkembang maupun negara maju. Di satu sisi, tarif dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah. Namun, di sisi lain, penerapan tarif juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan mengurangi daya beli konsumen.

Dalam konteks negara berkembang, meskipun tarif memberikan perlindungan bagi produsen lokal, dampaknya sering kali berujung pada inflasi dan pembatasan pilihan produk bagi konsumen. Sebaliknya, di negara maju, tarif dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dan menimbulkan reaksi balasan dari negara mitra dagang. Pendekatan ekuilibrium parsial yang digunakan dalam analisis ini membantu memahami efek langsung kebijakan tarif pada pasar tertentu, meskipun tidak mencakup dampak luas yang dapat terjadi di sektor lainnya.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan tarif dan dampaknya sangat penting dalam merancang strategi perdagangan yang efektif. Melalui kerjasama multilateral dan reformasi kebijakan perdagangan, negara-negara dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi global.

¹⁹ Aunaya Bayu, *Dampak Penetapan Tarif Impor Kedelai di Indonesia: Analisis Keseimbangan Parsial*, Jurnal Ilmiah Kemendag, 2022.

²⁰ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, *Analisis Simultan Sektor Moneter di Indonesia (Pendekatan Parsial Mundell-Fleming)*, Jurnal Ekonomi Pembangunan UNY, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Aunaya. 2022. *Dampak Penetapan Tarif Impor Kedelai di Indonesia: Analisis Keseimbangan Parsial*, Jurnal Ilmiah Kemendag.
- Cahyono, Yoyok dkk. 2021. *Ekonomi Internasional*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Elpisah. 2022. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful. 2021. *Analisis Simultan Sektor Moneter di Indonesia (Pendekatan Parsial Mundell-Fleming)*, Jurnal Ekonomi Pembangunan UNY.
- Hanafi, Imam. 2023. *Reformasi Kebijakan*. Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Hobijn, Bart dan Fernanda Nechio. 2025. "The Effects of Tariffs on Inflation and Production Costs". Federal Reserve Bank of San Frasisco, vol 2025 (12). Dalam <https://www.frbsf.org>, diakses 23 Mei 2025
- I, Inayah. 2021. "Dampak Penurunan Tarif Impor Komoditas Pertanian terhadap Kesejahteraan (Analisis Keseimbangan Parsial)". Diponegoro Journal of Economics, vol. 9(3). Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31567>, diakses 23 Mei 2025
- Malik, Nazaruddin. 2017. *Ekonomi Internasional*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Paryadi, Deki. 2018. "Dampak Kerja Sama Perdagangan Indonesia dengan Negara Gulf Cooperation Council (Gcc)" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 (3)
- Prayoga, Ayudha D Dkk. 2001. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Partnership for Business Competition.
- Puja, Putri dkk. 2024. "Kerjasama Regional Dan Multilateral Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia". *Indonesian Journal of Political Studies*, Vol. 4 (1)
- Purba, Bonajara. 2021. *Ekonomi Internasional*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- R, Dioni Y. & M. Rofi. 2024. "Dampak Reformasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Kinerja Perdagangan Luar Negeri". *Journal of Trade Development and Studies*, Volume 8 Nomor 2.
- S, Alam. 2007. *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sabaruddin, Sulthon Sjahril. 2015. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral RI-China: Sebuah Pendekatan SMART Model. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif*, Vol. 6 (2), 71-143. Dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/7440>
- Sihombing, Eva Ulina, Dkk. 2024. "Kebijakan Tarif dalam Ekonomi Internasional: Analisis Dampak dan Implementasi". EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4(1), 1708-1720. Dalam <https://ulilalbabinstitute>, diakses 23 mei 2025
- Sukirno, Sadono. 2016. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo..
- Swasono. Sri Edi. 1990. *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan usaha partisipatif Vs Konsentrasi Ekonomi*. Jakarta: Kopkar Dekopin.
- Trebilock, Michael J and Robert Howse. 1999. *The Regulation of International Trade*, Second Edition. New York: Routlege.